

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KUDETA TERHADAP PRESIDEN MESIR MUHAMMAD MURSI TAHUN 2012 – 2013

JURNAL SKRIPSI

ALVIANTO KURNIAWAN – 20130510259

Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Muhammad Mursi merupakan Presiden Mesir ke-lima. Terpilihnya Muhammad Mursi menjadi Presiden Mesir, mencatat sejumlah sejarah baru di Mesir. Pertama, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden yang dipilih melalui proses yang demokratis. Kedua, inilah kali pertama tokoh Ikhwanul Muslimin menjadi orang nomor satu di Mesir sejak organisasi tersebut didirikan Hasan al-Banna, 84 tahun silam. Ketiga, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden berlatar belakang sipil, sejak negara itu berbentuk Republik pada 1952. Setelah satu tahun masa kepemimpinannya, Muhammad Mursi dikudeta oleh militer Mesir karena dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kudeta terhadap Muhammad Mursi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik library research yakni data yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah, artikel, serta media massa maupun media elektronik yang relevan dengan penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini adalah kemungkinan adanya suatu pra kondisi yang menyebabkan terjadinya kudeta Muhammad Mursi oleh militer yang diteliti menggunakan teori kudeta. Selain itu, adanya kepentingan dari negara asing seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi di Mesir yang dijabarkan menggunakan teori politik luar negeri.

Kata Kunci : Kudeta, Militer, Muhammad Mursi, Kepentingan Politik Luar Negeri.

PENDAHULUAN

Muhammad Mursi merupakan Presiden Mesir ke-lima. Muhammad Mursi merupakan salah satu pemimpin Ikhwanul Muslimin yang memiliki pengaruh sangat kuat di kalangan masyarakat umum. Muhammad Mursi mulai aktif di Ikhwanul Muslimin sejak 1977. Sejak aktif di Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi berulang kali masuk penjara, baik di masa Presiden Anwar Sadat (1970 – 1981), maupun di era Presiden Hosni Mubarak (1981 – 2011) atas tuduhan melakukan gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan. Sebab, sepanjang tiga rezim Mesir mulai dari Presiden Gamal Abdul Nasser (1953 – 1970), berlanjut rezim Presiden Anwar Sadat (1970 – 1981), hingga rezim Presiden Hosni Mubarak (1981 – 2011), Ikhwanul Muslimin dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Memasuki dekade kedua abad ke-21, kawasan Timur Tengah ditandai dengan geliat rakyat menggugat berbagai kepemimpinan nasional mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai kebangkitan Dunia Arab atau Arab Spring. Yang terjadi adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di Dunia Arab. Para pengunjuk rasa di Dunia Arab mendengarkan slogan rakyat ingin menumbangkan rezim ini. Rangkaian ini berawal dari protes pertama yang terjadi di Tunisia tanggal 18 Desember 2010 setelah pembakaran diri Mohamed Bouazizi dalam protes atas korupsi polisi dan jaminan kesehatan. Dengan kesuksesan protes di Tunisia, gelombang protes selanjutnya menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir, dan Yaman, kemudian ke negara – negara lain.

Pada perjalanan pemerintahan Mesir, rezim Husni Mubarak berkuasa kurang lebih tiga puluh tahun dengan gayanya yang otoriter. Hal-hal paling mendasar dari sistem otoritarianisme yang diterapkan Mubarak adalah pemerintahan yang sewenang-wenang menggunakan hukum dengan segala instrumen negara yang memaksa untuk memonopoli kekuasaan dan menolak hak-hak politik kelompok lain untuk meraih kekuasaan. Sebelum Mubarak, pemerintahan Mesir dipegang oleh Jendral Mohammad Naguib lewat kudeta militernya tahun 1952 yang melibatkan Kelompok Perwira Bebas (Free Officer). Naguib tak lama memerintah karena segera digeser oleh Nasser (1952-1970), kemudian diteruskan Anwar Sadat (1970-1981), dan Hosni Mubarak (1981-2011) setelah Sadat ditembak mati pada acara parade militer. Perlu diketahui mereka semua adalah tentara, dan bagian dari kelompok Perwira Bebas (Free Officer).

Pada 25 Januari 2011 terjadi demonstrasi yang dimulai oleh pemuda menentang kepemimpinan Mubarak dan menuntut perubahan, massa menamakan hari itu dengan Yawm Al Ghadab (hari kemarahan). Pergolakan yang terjadi di sejumlah provinsi seperti Bani Suez, Mansoura, Tanta, Alexandria, dan Port Said. Aksi ini membawa pesan penting yaitu tidak inginnya rakyat dengan kepemimpinan totaliter secara politik, rakyat yang berkumpul di lapangan Tahrir sehari-hari membuktikan bahwa Mesir sedang mengalami kebuntuan politik yang luar biasa. Kesalahan lain Mubarak adalah terlena begitu lama dengan kekuasaannya ditambah Mubarak ingin mewariskan kekuasaan pada putranya Gamal Mubarak, proses politik itu memperjelas ke arah pembentukan dinasti politik. Rakyat juga bosan dengan gayanya yang reaktif terhadap kritik yang mudah menangkap para pengkritik.

Hampir seribu orang berkumpul di alun – alun Tahrir, Kairo. Sehingga pada malam 28 Januari, pemerintah Mesir menghentikan koneksi internet demi menghambat gerakan protes. Namun hal ini tidak menurunkan semangat, justru puluhan ribu protes segera menggema di beberapa kota besar hingga Presiden Hosni Mubarak berhasil diturunkan dari jabatannya sebagai presiden Mesir. Bersama dengan berakhirnya kekuasaan Mubarak, Mesir memasuki babak baru dalam dunia politiknya. Untuk pertama kalinya pemilihan presiden di Mesir dipilih melalui pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam waktu setahun, Muhammad Mursi berhasil membawa Ikhwanul Muslimin dengan partainya dalam memperoleh suara dalam pemilihan umum di Mesir sebanyak 47%. Perolehan suara yang cukup besar tersebut mengantarkan Muhammad Mursi menjadi Presiden.

Pelantikan Muhammad Mursi, mencatat sejumlah sejarah baru di Mesir. Pertama, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden yang dipilih melalui proses yang demokratis. Kedua, inilah kali pertama tokoh Ikhwanul Muslimin menjadi orang nomor satu di Mesir sejak organisasi tersebut didirikan Hasan al-Banna, 84 tahun silam. Ketiga, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden berlatar belakang sipil, sejak negara itu berbentuk Republik pada 1952. Presiden Mursi merupakan presiden ke-lima di era republik. Empat presiden sebelumnya berlatar belakang militer, yaitu Muhammad Naguib (1953-1954), Gamal Abdul Nasser (1956-1970), Anwar Sadat (1970-1981), dan Hosni Mubarak (1981-2011).

Setelah satu tahun memimpin, terjadi kembali pergolakan politik di Mesir pada tahun 2013. Dalam pergolakan politik tersebut, sebagian masyarakat Mesir seperti kelompok Sekuler, Liberal, dan Kristen Koptik atau anti Islam menuntut penggulingan Presiden Mursi, yang dinilai bersikap diskriminatif (banyaknya anggota Ikhwanul Muslimin yang menduduki jabatan di pemerintahan) dan Presiden Mursi dinilai tidak memenuhi janji reformasi, perbaikan ekonomi, dan politik.

Akhirnya pada tanggal 3 Juli 2013, kepemimpinan sipil Presiden Mursi berhasil digulingkan oleh militer dengan cara kudeta yang dipimpin oleh Jendral Abdul Fattah As Sisi yang kemudian menunjuk Adli Mansur selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Presiden sementara sampai pemilu selanjutnya digelar kembali.

RUMUSAN MASALAH

Apa saja penyebab terjadinya kudeta terhadap Presiden Mesir Muhammad Mursi?

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah berupa Library Research, yaitu memanfaatkan data berupa data sekunder yang dikumpulkan dari perpustakaan, buku – buku, jurnal, artikel, laporan, media cetak, media elektronik, website serta kaya ilmiah dan juga skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

KERANGKA TEORI

1. Teori Kudeta

Secara sederhana, kudeta diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan militer untuk merebut kekuasaan, atau aksi politik untuk menggantikan (mendominasi) suatu kelompok atau rezim yang menjadi saingannya dengan rezim sendiri. Dalam melakukan kudeta, banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi para perwira militer. Namun segala faktor itu tergantung pada kondisi sosial politik yang ada pada masing-masing negara. Yang paling sering menjadi motif militer melakukan kudeta adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah sipil yang mengakibatkan menurunnya keabsahan pemerintahan sipil, baik karena pemerintahan sipil yang dianggap tidak bisa mengolah negara dengan baik atau juga karena kesengajaan militer ingin merebut kekuasaan demi kepentingan politiknya.

Kudeta merupakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan militer untuk merebut kekuasaan, atau aksi politik untuk menggantikan (mendominasi) suatu kelompok atau rezim yang menjadi saingannya dengan rezim sendiri. (Nordlinger, 1990) Dalam melakukan kudeta, banyak faktor – faktor yang dilatarbelakangi oleh para perwira militer. Namun segala faktor tersebut tergantung pada kondisi politik yang ada pada suatu negara. Yang paling sering menjadi motif militer melakukan kudeta adalah kesalahan – kesalahan yang dilakukan pemerintah sipil yang mengakibatkan menurunnya keabsahan pemerintah sipil, baik karena pemerintah sipil yang dianggap tidak bisa mengolah negara dengan baik atau juga karena kesengajaan militer yang ingin merebut kekuasaan demi kepentingan politiknya. (Nordlinger, 1990)

Menurut Edward Luttwak, ada beberapa persyaratan untuk terjadinya kudeta, yaitu: negara sasaran harus memiliki kemandirian yang besar serta pengaruh kekuatan – kekuatan asing terhadap

kehidupan politis internal harus relatif terbatas, dan juga negara sasaran harus memiliki suatu pusat politis. Jika terdapat beberapa pusat maka ini harus jelas bentuknya dan strukturnya harus politis dan bukan etnis. Jika negara dikendalikan oleh unit organisasi yang non-politis, maka kudeta hanya bisa dilaksanakan dengan persetujuan atau netralitas unit tersebut. (Luttwak, 1999, hal. 47)

Secara garis besar, ada pra kondisi untuk terjadinya kudeta. pertama, sindrom negara transisi. Di mana pola tradisional sudah rusak sementara pola baru belum terbentuk. Kedua, terjadinya jurang kelas sosial yang tajam akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat sehingga melahirkan jurang antara kaya dengan miskin. Di mana secara kuantitatif kaum miskin jauh lebih banyak daripada kaum kaya. Ketiga, terjadinya aksi sosial berdasarkan kelompok-kelompok (baik yang sadar politik atau tidak) dan mobilisasi sumber-sumber materil dalam negeri yang rendah.

Sejak revolusi tahun 1952, militer Mesir mulai mendapat perhatian dan memperoleh popularitas tersendiri di kalangan rakyat Mesir, karena pada saat itu Mesir mengalami titik balik sistem pemerintahan. Aksi kudeta yang dilakukan oleh pihak militer untuk pertama kalinya dibawah pimpinan Kolonel Gamal Abdul Nasser untuk menggulingkan Raja Farouk pada saat itu. Dari peristiwa tersebut, militer langsung menjadi sorotan dan dianggap sebagai tonggak kekuasaan dan pemrakarsa perubahan baru sejarah Mesir.

Besarnya peran militer Mesir dalam jalannya pemerintahan di Mesir membuat militer selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dalam setiap periode pemerintahan yang ada. Karena hal tersebut, membuat peran militer dalam pemerintahan Mesir tidak hanya berfungsi dalam pertahanan keamanan seperti yang seharusnya menjadi tugas militer, namun menjadikan militer lebih berkuasa dan mengatur sistem pemerintahan Mesir, mengingat militer Mesir telah memiliki peran yang signifikan dalam bidang – bidang sipil, terutama bidang politik dan ekonomi. Selain itu juga, Mesir memang belum siap untuk mengubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi karena masih terdapat banyak permasalahan di dalam negeri Mesir terutama masalah ekonomi dan kesenjangan sosial. Dan juga, militer belum siap untuk melepaskan tahta kekuasaannya yang sudah sedari lama dikuasainya kepada masyarakat sipil, karena militer Mesir tidak percaya bahwa masyarakat sipil dapat membuat keadaan Mesir menjadi lebih baik, militer Mesir juga takut terbongkarnya beberapa arsip pembunuhan terhadap rakyat Mesir dibuka kembali.

2. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa. Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

- a. menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;
- b. menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
- c. menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;
- d. mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan tindakan yang diperlukan;
- f. secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.

Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.

Sementara itu Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk mengjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (revisionist policy) atau mempertahankan kebijakan (status quo policy) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional. Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuasn politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

Hal ini dapat dilihat bahwa di negara Mesir sendiri terdapat beberapa kepentingan dari beberapa negara asing. Misalnya kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang politik terhadap Mesir ialah Amerika Serikat merasa khawatir setelah terpilihnya Muhammad Mursi menjadi presiden akan membuat Muhammad Mursi menjadi pemimpin yang besar. Hal tersebut dapat mengakibatkan kelompok Ikhwanul Muslimin dapat mempengaruhi kebijakan – kebijakan internal dan eksternal Mesir. Amerika Serikat beranggapan bila hal itu terjadi, Mesir akan menjadi negara Islam yang dapat

mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat. Selain itu, dalam bidang ekonomi juga terdapat kepentingan dari Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat yang sangat membutuhkan akses Terusan Suez untuk mendapatkan impor minyak dari Timur Tengah. Disini Amerika Serikat takut jika akses Terusan Suez tersebut tidak dibuka untuk umum lagi. Sedangkan Arab Saudi memiliki kepentingan dalam bidang ideologi yaitu Arab Saudi tidak ingin jika transisi ke sistem pemerintahan demokrasi di Mesir dapat mengakibatkan tuntutan yang serupa terhadap pemerintahan Arab Saudi, sehingga menjadikan ancaman yang serius bagi pemerintahan Arab Saudi dan seluruh keluarga kerajaan.

PEMBAHASAN

Penulis akan membahas mengenai peran militer yang sudah sangat lama berkuasa di Mesir, sehingga militer Mesir belum menginginkan kekuasaan Mesir dipimpin oleh kalangan sipil. Selain itu juga terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kudeta terhadap pemerintahan Muhammad Mursi oleh pihak militer.

Selain itu, juga akan dijelaskan mengenai apa saja alasan yang membuat Muhammad Mursi dikudeta dari kursi pemerintahannya, serta kepentingan nasional negara asing yang mendukung terjadinya kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi.

A. Pra Kondisi Dalam Negeri Mesir

Dalam pembahasan ini, terdapat berbagai faktor yang membuat militer melakukan kudeta, atau mengambil alih pemerintahan. Militer menilai bahwa pemerintah yang digulingkan gagal dalam menjalankan tugasnya, melakukan tindakan yang tidak sah di luar kelebagaannya, tidak bertanggung jawab dalam kemerosotan ekonomi, tidak mampu mengendalikan perasaan kecewa dan penentangan politik tanpa menimbulkan kekerasan dan kekacauan. Kegagalan itu memperkuat rasa tidak hormat dan benci militer pada pemerintah, kegagalan ini biasanya akan menggambarkan kemerosotan citra pemerintah sipil di mata masyarakat yang interest pada politik. Ditambah lagi dengan citra militer sebagai golongan nasionalis utama, militer mengidentifikasi diri dengan negara, dan negara sendiri adalah militer. Jadi, yang dianggap baik oleh militer juga baik untuk negara, dan mencitrakan kudeta sebagai kepentingan menjaga konstitusi negara.

Dalam suatu pemerintahan yang baru terbentuk ada berbagai macam kalangan plural yang ikut serta menjadi kekuatan politik, berbagai kalangan yang plural itu tidak bisa dinafikan atau hanya menonjolkan satu golongan saja untuk unggul dalam pemerintahan. Kesepakatan pembagian kekuasaan menjadi paling penting untuk memelihara stabilitas pemerintahan yang terdiri dari berbagai macam kekuatan politik.

Dalam suatu pemerintahan, keadaan ekonomi yang baik dan sejahtera adalah kriteria prestasi yang sangat penting, dan pemerintah dianggap yang paling bertanggung jawab atas kemajuan ekonomi itu. Ini sangat berkaitan dengan motif militer yang nantinya akan mengkudeta pemerintahan, karena laju ekonomi yang rendah akan memicu timbulnya kegaduhan pada masyarakat yang berpengaruh pada negara secara langsung. Kemunduran ekonomi yang dikelola pemerintah semakin menambah perasaan tidak hormat militer terhadap pemerintah, memperkuat anggapan militer dapat berperan sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan negara.

Keadaan negara yang kacau dengan meluasnya protes di beberapa daerah, membuat kondisi pemerintahan semakin buruk dan membuat militer mulai mengamati untuk ambil bagian dalam mengamankan negara. Ini adalah momentum yang dimanfaatkan militer untuk ikut berpolitik di tengah kekisruhan. Seperti yang dikatakan Amos Parlemutter, Secara garis besar, ada pra kondisi untuk terjadinya kudeta.

Pertama, sindrom negara transisi. Di mana pola tradisional sudah rusak sementara pola baru belum terbentuk. Dalam masyarakat ini, kesatuan masyarakat belum ada, lembaga-lembaga negara dan kontrol sosial belum beroperasi secara efektif, saluran komunikasi sangat

minim dan tidak ada lambang-lambang kesatuan masyarakat. Militer dianggap yang paling mampu mengatasi sindrom ini karena militer bisa memakai simbol-simbolnya untuk memerintah, dan mempersatukan masyarakat dengan sifat netral yang dimilikinya, serta kesanggupannya menjalin komunikasi dengan rakyat bawah. Pemerintahan Mesir di bawah kepemimpinan Mursi adalah masa transisi Mesir dalam berdemokrasi, satu langkah ke depan memulai nilai-nilai yang demokratis. Namun Mursi belum mempunyai referensi demokrasi internal yang tepat untuk diaplikasikan, tentang bagaimana cara mengakomodasi kepentingan yang beraneka ragam. Dalam demokrasi pasti ada perbedaan pendapat, tetapi demokrasi hanya akan berjalan bila ada modal sosial yaitu kesepakatan untuk saling percaya sebagai suatu bangsa meskipun berbeda-beda pendapat dan kepentingan, dan ini diikat dalam kegiatan-kegiatan sosial kelompok masyarakat sipil. Hal ini lah yang belum berhasil dibangun dan dimiliki Mesir. Rakyat kehilangan figur dan menganggap stabilitas itu lebih penting, daripada menjalani demokrasi bersama pemimpin yang tidak sanggup menjaga keragaman. Nilai demokrasi yang diterapkan di Mesir baiknya adalah demokrasi yang merangkul seluruh kalangan. Dalam kegaduhan yang semakin parah menambah momentum dan kekuatan militer menjadi harapan bagi rakyat atas kesalahan-kesalahan yang telah dibuat pemerintah sipil.

Kedua, terjadinya jurang kelas sosial yang tajam akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat sehingga melahirkan jurang antara kaya dengan miskin. Di mana secara kuantitatif kaum miskin jauh lebih banyak daripada kaum kaya. Kondisi ekonomi Mesir memang telah memburuk sejak kepemimpinan Hosni Mubarak lengser dari jabatannya pada Februari 2011. Karena itu, sejak Muhammad Mursi dilantik menjadi Presiden, Mursi langsung berhadapan dengan krisis keuangan. Krisis keuangan tersebut dikarenakan adanya penyusutan pemasukan dari industri pariwisata akibat ketidakstabilan politik. Tidak hanya itu defisit anggaran Mesir pun juga turun 42% dan berada pada posisi 30 miliar dollar AS. Dari Januari 2011 hingga Desember 2012, cadangan devisa Mesir berada di posisi 15 miliar dollar AS dari yang semula diposisi 36 miliar dollar AS.

Angka pertumbuhan ekonomi pun turun menjadi 2,2% pada tahun fiskal 2012, angka tersebut turun dari 5,1% dari tahun 2009 hingga 2010 ketika terjadinya revolusi yang menjatuhkan Presiden Husni Mubarak. Turunnya perekonomian Mesir saat itu diperkirakan akan terus terjadi hingga 2% pada akhir Juni. Krisis tersebut didukung lagi dengan mata uang pound Mesir telah kehilangan 12,5% terhadap nilai dollar Amerika.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan tersebut mengakibatkan memburuknya tingkat pengangguran dan kemiskinan di negara Mesir dengan jumlah 82,5 orang. Lebih dari 3,3 juta orang, 13% pengangguran meningkat dan 46,4% dari populasi yang berusia 20 sampai 24 tahun masih belum bisa menemukan pekerjaan. Tidak hanya itu, lebih dari 53% rakyat Mesir masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan dua dollar perhari. Keadaan tersebut semakin parah dengan defisit negara yang naik hingga 10,8% dari PBD. Disini dapat dilihat bahwa adanya jurang kelas sosial di Mesir dimana populasi orang miskin lebih banyak dibandingkan dengan orang kaya.

Ketiga, terjadinya aksi sosial berdasarkan kelompok- kelompok (baik yang sadar politik atau tidak). Adanya aksi sosial yang dilakukan rakyat Mesir terhadap pemerintahan Muhammad Mursi karena melihat kondisi negara Mesir yang tidak kunjung membaik. Berbagai macam masalah yang terjadi pun menyebabkan konflik diberbagai daerah di negara Mesir menjadi alasan rakyat Mesir untuk melengserkan Presiden Mesir. Adapun alasan – alasan rakyat melakukan aksi sosial terhadap Presiden Mursi ialah :

1. Dominasi Ikhwanul Muslimin

Berdasarkan latar belakang, kelompok Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan yang terlarang sejak di Era Mubarak dan pemerintahan sebelumnya. Para anggota serta petinggi

Ikhwanul Muslimin pun sering ditangkap atau dipenjarakan oleh pihak militer. Akan tetapi hal itu tidak membuat Ikhwanul Muslimin melemah, bahkan organisasi tersebut tetap tumbuh dan meluas dipenjuru negara Mesir.

Dalam penjelasan sebelumnya, bahwa Muhammad Mursi berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dimana kelompok tersebut merupakan kelompok yang telah dikesampingkan sejak masa Pemerintahan terdahulu. Akan tetapi setelah terjadi revolusi, kelompok Ikhwanul Muslimin mulai menunjukkan perannya dalam pemerintahan di negara Mesir. Bukti nyata bahwa Ikhwanul Muslimin turun langsung dalam pemerintahan di Mesir ialah keikutsertaan Ikhwanul Muslimin dalam pemilihan Presiden. Ikhwanul Muslimin membentuk partai yang bernama Partai Keadilan dan Kebebasan (Freedom and Justice Party).

Partai tersebut memilih Muhammad Mursi sebagai calon Presiden yang diikutkan dalam pemilihan umum pada akhir 2012. Dalam hasil pemilihan tersebut, Muhammad Mursi muncul sebagai pemenang dengan meraih suara sebanyak 51,73%. Partai pemenang pemilu yang berasal dari kalangan Ikhwanul Muslimin yang membuat Muhammad Mursi terpilih menjadi Presiden, memang tidak membuat semua rakyat Mesir menyukainya.

Hal tersebut terlihat pada setahun terakhir pasca terpilihnya Muhammad Mursi menjadi Presiden bahwa rakyat Mesir mulai menunjukkan ketidaksukaannya dengan partai tersebut. Ketidaksukaan itu semakin parah ketika adanya tuduhan bahwa Presiden Muhammad Mursi lebih mementingkan Ikhwanul Muslimin dengan memberikan kursi – kursi kekuasaan pada kader Ikhwanul Muslimin.

Akan tetapi, tuduhan tersebut dibantahkan oleh pihak pro Mursi. Para pendukung Mursi tersebut mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Muhammad Mursi telah menawarkan kursi vital di kabinet dan lembaga negara lainnya pada kaum oposisi. Namun dari pihak oposisi yang ditawarkan tidak menerima dan malah menolaknya.

2. Dekrit Presiden 22 November 2012

Selama menjadi Presiden, Muhammad Mursi telah mengeluarkan dekrit dalam pertahanan negara. Dekrit tersebut dikeluarkan pada tanggal 22 November 2012 mengenai kekuasaan baru yang dibuat Presiden Muhammad Mursi. Dalam dekrit tersebut, Mursi memecat Jaksa Agung, membuat semua keputusan Presiden kebal dari gugatan hukum, dan menegaskan keabsahan parlementer Mesir. Maksud dari dekrit tersebut juga menyatakan bahwa semua keputusan dan ketentuan hukum yang dikeluarkan tidak dapat dibatalkan dan Mahkamah Konstitusi tidak berhak membubarkan Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru.

Setelah dekrit tersebut diterbitkan, pemerintahan Mursi menggelar referendum yang bertujuan untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu – buru. Konstitusi tersebut dinilai hanya mencerminkan kepentingan kelompok Mursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir.

3. Pelanggaran Demokrasi dan HAM

Tidak hanya dalam permasalahan ekonomi dan juga politik, permasalahan yang terjadi Mesir selama Mursi menjabat menjadi Presiden di Mesir ialah banyaknya aksi pelanggaran mengenai Hak Asasi Manusia, demokrasi dan toleransi. Presiden Mursi dinilai telah gagal dalam melakukan reformasi sektor keamanan terutama di Kepolisian, paramiliter, dan Dinas Intelijen Mesir.

Saat polisi Mesir terlibat dalam pembantaian di Port Said pada Januari 2013 yang menyebabkan 30 orang meninggal, Presiden Mursi dinilai tidak melakukan usaha dalam

menindak lanjuti pelakunya dengan cara yang tegas. Tidak hanya itu, terjadi juga serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan Kaum minoritaspun meningkat. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya aksi sosial oleh Kaum Kristen Koptik dan kaum minoritas yang merasa bahwa Muhammad Mursi tidak dapat menjaga keamanan warga negaranya.

Parlemen Mesir yang ketika itu sebagian besar berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin dinilai melakukan usaha terus menerus dalam menerbitkan undang – undang baru yang membatasi masyarakat sipil. Terdapat isu mengenai adanya sebuah rancangan UU tentang keberadaan NGO dan disebut – sebut akan mengontrol organisasi masyarakat sipil. Semua faktor ini bersama-sama membuat gelombang anti Mursi terus menguat. Terlebih setelah sebuah gerakan populer yang menamakan dirinya `Tamarod` muncul pada awal tahun ini dan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi.

B. Adanya Faktor Eksternal dari Pihak Asing

Kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi juga tidak lepas dari kepentingan nasional negara – negara asing. Selain untuk membentuk terjalannya kerjasama antar negara, kepentingan nasional negara asing tersebut juga demi mengamankan apa yang menjadi kepentingan nasional mereka. Terdapat dua negara yang memiliki kepentingan nasional di Mesir, yaitu Amerika Serikat dan Arab Saudi.

1. Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Tidak hanya dari pihak internal ataupun pihak dalam negeri yang ingin menghancurkan pemerintahan Presiden Mursi. Pihak asing pun ingin Presiden Muhammad Mursi turun dalam jabatan, hal itu dapat dilihat dalam beberapa dukungan yang dijalankan dari pihak asing kepada pihak oposisi. Dukungan tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Amerika Serikat ikut terlibat dalam pendanaan kepada pihak oposisi untuk mengudeta Presiden Mursi dan juga ikut terlibat dalam propaganda dan dukungan lainnya seperti ekonomi dan politik.

Padahal melihat dari kebijakan demokrasi Amerika Serikat yang senantiasa mempromosikan demokrasi di seluruh dunia. Salah satunya ialah dalam peristiwa Arab Spring. Amerika Serikat tetap bertekad dalam mempromosikan demokrasi dan mendukung warga negara lainnya dalam mendirikan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam pidato Presiden Barack Obama yang ditunjukkan kepada aktivis demokrasi di seluruh dunia menyatakan bahwa “Oppressive governments are sharing worst practices to weaken civil society”.

Maka dari itu, kebijakan demokrasi telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Akan tetapi sikap Amerika Serikat tidak sejalan dengan apa yang menjadi kebijakannya tersebut pada proses peristiwa penggulingan Presiden Muhammad Mursi di Mesir. Amerika Serikat terlihat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya dan terbukti memiliki peran dalam peristiwa tersebut.

Adanya kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang politik ialah negara ini merasa khawatir setelah terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden. Amerika Serikat beranggapan bahwa jika Muhammad Mursi dapat menjadi pemimpin Mesir, hal tersebut mengakibatkan kelompok Ikhwanul Muslimin dapat mempengaruhi kebijakan internal dan eksternal Mesir. Pihak Amerika Serikat beranggapan bila itu terjadi Mesir akan menjadi negara Islam dan tampak bersifat merombak dan mengancam. Menurut Amerika Serikat negara – negara Islam terkesan interinstik anti – Barat dan anti-demokrasi. Islam pun dianggap sebagai budaya yang bermusuhan dan merupakan ancaman bagi kepentingan dan nilai – nilai

budaya Amerika Serikat. Pandangan tersebut pun berkaitan dengan pandangan yang dimiliki Amerika Serikat yaitu Islamophobia.

Menurut Amerika Serikat kalangan kelompok Islam dianggap sebagai kalangan yang ekstimis (anti-liberal, annti-pluralisme, dan anti-feminisme). Pandangan tersebut tidak dapat dihilangkan dan telah mengakar sejak lama dari berbagai peristiwa yang telah terjadi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat merasa khawatir jika Mesir menjadi negara Islam dan terciptanya kebijakan luar negeri Islam Revolusioner. Amerika Serikat lebih memilih negara Mesir menjadi negara sekuler-liberal daripada menjadi negara Islam.

Faktor lainnya adalah dalam mempertahankan kepentingan nasional Amerika Serikat ialah dalam bidang ekonomi, yaitu Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional di Terusan Suez karena hal tersebut dapat mempermudah pelayaran Amerika Serikat ke Asia dan Eropa. Terusan ini dapat menghemat biaya dan waktu pelayaran Amerika Serikat ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. maka, Terusan Suez digunakan sebagai alat dalam memperlancar strategi politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena hal itu, Amerika Serikat khawatir bila Muhammad Mursi memotong wilayah udara dan akses kanalnya. Karena selama ini Amerika Serikat sangat bergantung dengan Terusan Suez dalam mengimpor minyak dari Timur Tengah. Amerika Serikatpun menginginkan adanya suplai energi murah (minyak) dari Timur Tengah termasuk Mesir.

2. Kepentingan Nasional Arab Saudi

Disaat terjadinya krisis politik terkait protes penentang dan pendukung terhadap pemerintahan Mursi yang pada gilirannya menyebabkan intervensi militer dijadikan momentum bagi Arab Saudi dengan mengambil langkah mendukung aksi militer untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi dari kekuasaannya.

Harapan Saudi adalah agar Ikhwanul Muslimin tidak menjadi ancaman dan bekerja sebagai sekutu bawahan dalam urusan bilateral dan regional. Selanjutnya, penguasa Arab Saudi tidak membiarkan nilai-nilai ideologis Ikhwanul Muslimin dan demokrasi berkembang di lingkungan Arab yang pengaruh itu muncul akibat pergeseran politik ke arah demokrasi dari Ikhwanul Muslimin yang dapat menyebabkan tuntutan serupa apa yang telah terjadi di Mesir bisa terjadi di Arab Saudi. Ketika muncul bahwa demokrasi sebagai sistem politik dan Ikhwanul Muslimin sebagai partai politik yang menetap di Mesir, menjadi penyebab ancaman yang serius terhadap Saudi dan seluruh keluarga kerajaan.

Raja Abdullah meminta Arab untuk berdiri bersama untuk melawan upaya apa yang telah mengguncang Mesir. Sebagaimana sebuah pernyataan yang disampaikannya. Raja Saudi Tetap Mendukung Militer Mesir, dan Sebut Ikhwan Sebagai teroris. Dia menyatakan : "The Kingdom of Saudi Arabia, its people and government stood and stands by today with its brothers in Egypt against terrorism." I call on the honest men of Egypt and the Arab and Muslim nations ... to stand as one man and with one heart in the face of attempts to destabilise a country that is at the forefront of Arab and Muslim history,".

Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz menyatakan dukungannya kepada pemerintah Mesir dalam melawan apa yang disebutnya tindakan terorisme. Abdul Aziz menyebut keamanan Mesir kini tengah diserang oleh kaum pembenci. Dia memperingatkan bagi siapa pun yang mencampuri urusan dalam negeri Mesir sama dengan memicu hasutan. Raja Abdullah menambahkan Mesir sesungguhnya bisa melewati proses ini menuju kedamaian. Situasi di Mesir sangat genting dan Arab Saudi telah menempatkan diri di posisi yang benar.

Seruan Raja Abdullah kepada bangsa Arab untuk mendukung junta militer dan kedaulatan pemerintah interim Mesir di sambut baik oleh negara-negara teluk. Alasan

mengapa beberapa negara Teluk telah meluncurkan kampanye terhadap anggota Ikhwanul Muslimin adalah karena mereka khawatir kekuasaan IM menjangkau di negara-negara Arab Spring. Menambah kekhawatiran mereka adalah semakin berkembangnya hubungan antara pemerintah Ikhwanul Muslimin di satu sisi dengan negara-negara yang memiliki gerakan-gerakan yang berafiliasi kepadanya, seperti Republik Turki, yang tampaknya telah menemukan dalam organisasi sekutu baru yang dapat membantu Turki memperluas pengaruhnya di kawasan Arab.

Bantuan US\$5 Miliar Untuk Mesir Setelah Penggulingan Presiden Muhammad Mursi

Arab Saudi akan memberikan bantuan kepada Mesir sebesar US \$ 5 miliar (3,9 miliar euro) untuk mendukung ekonomi Mesir, enam hari setelah militer menggulingkan Presiden Muhammad Mursi. Bantuan tersebut, yang diputuskan oleh Raja Abdullah, pada 9 Juli 2013, akan terdiri atas US \$2 miliar deposito bebas bunga di bank sentral Mesir, US \$1 miliar donasi, dan setara dengan US \$2 miliar berupa produk-produk minyak dan gas. Bantuan \$5 milyar yang disalurkan Arab Saudi mencerminkan dukungan kerajaan terhadap situasi dan perubahan terbaru di Kairo.

Cadangan devisa Mesir hanya \$14.9 billion pada akhir Juni, menurut bank sentral negara itu, kurang dari setengah jumlah pada awal tahun 2011. Cadangan, diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi, terutama sektor konstruksi, pariwisata dan investasi, dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi defisit anggaran negara. Bantuan Dana dari Arab Saudi terdiri dari US \$2 miliar deposito bank sentral, \$2 milyar pada produk-produk energi, dan \$1 miliar dalam bentuk uang tunai, sebagai mana disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibrahim Saudi Allassaf.

Bukan itu saja, Arab Saudi bahkan Siap Bantu Mesir jika Barat Stop Bantuan Keuangan. Sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal. Menteri Luar Negeri Arab Saudi itu mengatakan, Arab Saudi dan negara-negara Islam akan membantu Mesir jika negara-negara Barat menghentikan bantuan keuangan untuk Kairo. Bagi negara-negara yang sudah mengumumkan akan memangkas bantuan untuk Mesir, atau mengancam untuk melakukan itu, kami katakan Arab Saudi dan negara-negara Islam sangat kaya dan tidak ragu membantu Mesir.

Pernyataan ini disampaikan sekembalinya Pangeran Faisal dari Perancis untuk menggelar pembicaraan dengan Presiden Francois Hollande, yang mengecam keras pertumpahan darah di Mesir. Pangeran Faisal mengkritik, negara-negara Barat yang mengecam tindakan Mesir membubarkan pendukung Ikhwanul Muslimin. Dia mengatakan, Mesir tengah memerangi terorisme. Semua negara yang mengecam Mesir seharusnya memahami bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya akan menimpa Mesir, tetapi juga menimpa mereka yang berkontribusi atau mendukung masalah dan kekacauan yang terjadi di Mesir.

Hubungan Baik Arab Saudi dengan Pemerintah Sementara Mesir

Pemerintah sementara yang baru di Mesir telah memilih untuk menerima Arab Saudi sebagai teman dengan menerima bantuan Saudi bersama dengan penawaran bantuan dari negara-negara Teluk lainnya seperti UEA dan Kuwait. Dukungan dan pake bantuan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Mesir sangat berarti bagi pemerintah baru Mesir. Presiden Interim Mesir Adly Mansour tidak akan pernah melupakan dukungan yang diberikan Raja Abdullah. Untuk itu kini Mesir akan kembali memperkuat hubungan dengan Arab Saudi.

Di bawah pemerintah sementara Mesir Adly Mansour, Mesir kembali melakukan hubungan dekat. Hubungan dekat ini sudah terlihat ketika Raja Abdullah memberi dukungan penuh terhadap militer Mesir dan pemerintahan Adly Mansour. Presiden interim Mesir Adly Mansour mendapatkan kembali dukungan dari Raja Arab Saudi Abdullah untuk memerangi

terorisme dalam kunjungannya ke Arab Saudi pada 8 Oktober 2013. Kunjungan itu adalah perjalanan perdananya ke luar negeri setelah dia menggantikan Muhammad Mursi yang digulingkan militer pada 3 Juli 2013.

Raja Abdullah, pemimpin pertama yang mendukung pelengseran Mursi, kembali memastikan dukungan Arab Saudi untuk upaya Mesir memerangi terorisme dan menghadapi siapa pun yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Arab Saudi dan negara-negara Teluk sudah sejak lama melihat Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman. Di antara negara-negara Teluk, hanya Qatar yang menyatakan dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Mesir, Arab Saudi dan negaranegara Teluk lainnya bahkan menjanjikan bantuan untuk pemerintahan baru Mesir yang didukung militer. Atas dukungan itu, Mansour menilai kunjungan ke kerajaan kaya minyak itu adalah sebuah keharusan, untuk mengungkapkan rasa terima kasih terhadap pemerintahannya. Raja Abdullah adalah kepala negara pertama yang memberi selamat atas penunjukan Mansour sebagai presiden sementara Mesir, hanya beberapa jam setelah pelantikannya Juli lalu.

Mengunjungi kerajaan adalah suatu keharusan, bagi Presiden Adly Mansour untuk berterima kasih kepada Raja Abdullah secara personal atas dukungannya untuk Mesir terkait dukungan ekonomi dan politik diberikan Arab Saudi untuk membangun kembali ekonomi Mesir yang kacau ketika terjadinya krisis politik di Mesir. Presiden Adly Mansour sangat mengandalkan dukungan dari Arab Saudi.

Selain itu, Tujuan kunjungan itu juga adalah untuk memperdalam hubungan dengan Saudi pada saat Mesir membutuhkan Saudi lebih dari sebelumnya. Menteri luar negeri Arab Saudi, Saud Al Faisal, menyampaikan bahwa negaranya siap untuk mengkompensasi Mesir untuk setiap bantuan yang ditarik sebagai akibat dari transisi politik. Raja Abdullah juga menegaskan sikap pemerintah dan Kerajaan Arab Saudi mendukung saudara-saudara di Mesir melawan terorisme dan hasutan sekaligus mengatakan pemerintah Mesir yang didukung militer adalah pemerintahan yang sah.

Dukungan ekonomi yang diberikan Arab Saudi akan sangat penting bagi keberhasilan pemerintahan transisi Mesir itu, sebagaimana Mesir telah berjuang untuk memulihkan ekonomi dari resesi yang melanda setelah revolusi 2011. Krisis politik di Mesir yang dilimpahkan menjadi bentrokan dan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir, membuat sektor pariwisata dan investasi terhenti. Dukungan yang diberikan oleh Arab Saudi dan negara teluk UEA, memiliki dampak terbesar dalam mencongkel keputusan Mesir membuat jauh dari tekanan situasi ekonomi yang memburuk. Untuk itu, dukungan ekonomi Saudi akan terus menjadi penting tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka menengah serta Para pengamat mengatakan Arab Saudi memprioritaskan hubungan dengan pemerintah yang didukung militer di Kairo dari masalah keamanan juga.

Bagi pemerintah Arab Saudi merangkul dan mendukung pemerintah sementara Mesir Adly Mansour, adalah sebuah investasi dalam hubungan dengan rezim baru di Mesir. Arab Saudi merasa aman dari ancaman pengaruh Ikhwanul Muslimin ketika Militer Mesir mampu melengserkan Mursi dan Ikhwanul Muslimin dari kekuasaannya. Dengan ini Arab Saudi bisa bertahan dalam kebijakan luar negeri dan internal negaranya dalam upaya untuk mencegah gejolak politik dan sosial, kerusuhan dan aksi protes terhadap pemerintah, menstabilkan rezim mereka, dan mencoba untuk mempengaruhi unsur-unsur Islam di negara-negara lain sebanyak mungkin. Sehingga Raja Abdullah harus bertindak tegas dan progresif dalam melakukan kebijakan.

REFERENSI

Buku

- ABM, M. A. (2013). Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah Yang Penuh Darah. Yogyakarta: IRGiSoD.
- Bastoni, H. A. (2012). DR. Mursi, Presiden yang Hafal Qur'an. Bogor: Pustaka Al-Bustam.
- Bogle, E. C. (1996). The Modern Middle East: From Imperealism to Freedom 1800-1958. New Jersey: Prentice Hall.
- Ghozzah, A. (2012). Cahaya Kebangkitan dari Negeri Anbiya. Jakarta: Maktaba Gaza.
- Heikal, M. (1984). Autum of Fury: The Assossonation of Saddat. London: Corgi.
- Jatmika, S. (2014). Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah. Yogyakarta: Maharsa.
- Luttwak, E. (1999). Kudeta: Praktek Penggulingan Kekuasaan. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Mas'oed, M. (1994). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. LP3ES.
- Nordlinger, E. A. (1990). Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan. Jawa Tengah: Jakarta Rineka Cipta.
- Sitepu, P. A. (2011). Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sobiri, A. (2013). Muhammad Mursi: Pemimpin Negara dan Penghafal Al-quran. Yogyakarta: Imperium.
- Sorensen, R. J. (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waskito, A. (2013). Air Mata Presiden Mursi: Tragedi Kudeta Militer 3 Juli 2013. Jakarta: Al-Kautsar.

Jurnal

- Binsar. (2019). Israel Mengaku Sebagai Dalang Kudeta Terhadap Morsi di Mesir.
- Dewi, Y. (2016). Konflik Internal dan Eksternal Dalam Kudeta Militer Mesir.
- HaloKawan. (2019). peta mesir 3.
- Iskandar. (2014). Dukungan Mesir terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina 2011-2013. Jurnal Online Mahasiswa, vol. 1, no. 2, Riau: FISIP UNRI, 04.
- K, R. P. (2015). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Penggulingan Muhammad Mursi di Mesir Tahun 2013. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 2, 362.
- Kompas. (2011). Mubarak Terlenu Begitu Lama Peringatan Bagi Pemimpin Yang Lengah. Kompas, 1.
- Kuncahyono, T. (2013). Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir. Kompas Media Nusantara, 24.
- Misrawi, Z. (2011). Mesir di Persimpangan Jalan. Kompas, 6.
- Pradhan, P. K. (2013). Post-Morsi Egypt: Saudi Manoeuvring and Iranian Dilemma . Associate Fellow at the Institute for Defence Studies & Analyses (IDSA), New Delhi, 03-05.
- Rafika. (2015). Kudeta Militer Mesir Terhadap Pemerintahan Mursi Tahun 2013.
- Setiawan, A. (2013). Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013.

Susanti, E. (2019). Terkuak, Israel Ada di Balik Kudeta Militer terhadap Morsi di Mesir.

Website

AS, W. (2013, 07 10). Arab Saudi Bantu Mesir US\$5 Miliar. Diambil kembali dari Metro TV: [http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/10/7/167059/Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US\\$5-miliar](http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/10/7/167059/Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US$5-miliar)

BBC Indonesia. (2012). BBC Indonesia. Diambil kembali dari BBC Indonesia: (http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120121_Mesir_pemilu.shtml)

BBC Indonesia. (2012). Mesir: Protes anti Presiden Morsi diwarnai bentrokan. Diambil kembali dari BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121205_morsi_Mesir.html.

BBC Indonesia. (2014). Aksi Boikot sejumlah surat kabar Mesir. Diambil kembali dari BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/2014_Mesir_koran.html.

Burhani, R. (t.thn.). 63,8 persen rakyat Mesir mendukung konstitusi baru. Diambil kembali dari AntaraNews: <http://www.antaraneews.com/berita/350233/638-persen-rakyat-Mesir-dukung-konstitusi-baru.html>.

Kompas. (2013). Kompas. Diambil kembali dari Kompas: <http://internasional.kompas.com/read/2013/04/02/17155381/IMF.Bicarakan.Kembali.Pinjaman.untuk.Mesir>

Muftisany, H. (2012). Mursi Umumkan Referendum Konstitusi. Diambil kembali dari Republika: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/12/02/mee1ku-mursi-umumkan-referendum-konstitusi.html>.

Pitakasari, A. R. (2013, 05 07). Rombak Kabinet, Mursi Angkat 9 Menteri Baru. Diambil kembali dari Republika: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/05/07/mmfr6t-rombak-kabinet-mursi-angkat-9-menteri-baru.html>.

Putra, Y. M. (2016, 01 01). Profil Mohammed Mursi, Presiden terpilih Mesir. Diambil kembali dari Republika.co.id: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/06/24/m64pt7-profil-mohammed-mursi-presiden-terpilih-mesir>

Republika. (2013). Republika. Diambil kembali dari Republika: (<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/>)

Tempo. (2013). Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan. Diambil kembali dari Tempo Dunia: <http://dunia.tempo.co/read/news/2013/07/04/115493383/empat-alasan-Presiden-msir-digulingkan.html>